



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 288 /V.09/HK/2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL TAHUN 2022-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial Tahun 2020-2025, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial Tahun 2020-2025;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL TAHUN 2022-2024.**
- KESATU : Menyusun Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial Provinsi Lampung Tahun 2022-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengefektifkan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan Instansi dan Organisasi terkait.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-9-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta;
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Pengadilan Tinggi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Direktur Dr. H. RSUDAM Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	SASARAN	TARGET SASARAN			INSTANSI/LEMBAGA
						2022	2023	2024	
11	Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan	Penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan		Pekerja di perusahaan	100 kasus	100 kasus	150 kasus	Dinas Tenaga Kerja
12	Perlindungan perempuan dan anak dalam Pencegahan konflik sosial	Komunikasi dengan pihak terkait untuk pemenuhan fasilitas yang aman dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban konflik sosial, edukasi terhadap pelajar dan mahasiswa tentang kerukunan dan toleransi		Perlindungan bagi perempuan dan anak korban konflik sosial, pemahaman tentang kewarganegaraan dan nilai kebangsaan yang non diskriminatif	Korban konflik sosial, pelajar, mahasiswa, guru dan dosen	1	1	1	LM dalam Forkom Puspa

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	SASARAN	TARGET SASARAN			INSTANSI/ LEMBAGA
						2022	2023	2024	
12	Pemberdayaan lembaga dalam peningkatan pelayanan perempuan, anak dan masyarakat	Meningkatnya penanganan kasus perempuan dan anak pada lembaga terkait	Kapasitas kelembagaan saling bersinergi dalam penanganan kasus perempuan dan anak	Pelayanan penanganan kasus perempuan dan anak lebih meningkat dan kualitas pelayanan pada perempuan dan anak	Peningkatan kualitas layanan perempuan dan anak				Dinas PPPA Provinsi Lampung
13	Program pengawasan ketenagakerjaan	Pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang mempekerjakan TKA)		Pekerja di perusahaan	50 perusahaan	45 perusahaan		Dinas Tenaga Kerja
14	Penataan bangunan kawasan, pemukiman dan gedung	Penataan dan penetapan bangunan di kawasan strategis dan permukiman kumuh	Penataan, perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung dan swadaya masyarakat di permukiman kumuh	Pembangunan ruang terbuka hijau, hunian masyarakat, gedung perpustakaan dan prasarana SMAN	Terwujudnya ruang bermain anak, pelayanan pendidikan anak dan meningkatkan gemar membaca	11 lokasi	15 lokasi	15 lokasi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	SASARAN	TARGET SASARAN			INSTANSI/LEMBAGA
						2022	2023	2024	
15	Penataan bangunan kawasan, pemukiman dan gedung	Penataan dan penetapan bangunan di kawasan strategis dan permukiman kumuh	Penataan, perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung dan swadaya masyarakat di pemukiman kumuh	Pembangunan ruang terbuka hijau, hunian masyarakat, gedung perpustakaan dan prasarana SMAN	Terwujudnya ruang bermain anak, pelayanan pendidikan anak dan meningkatkan gemar membaca	11 lokasi	15 lokasi	15 lokasi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI